

**TRADISI SALAH SIMALAH DI DESA TELUK PULAI LUAR
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
(MENURUT PERSPEKTIF 'URF)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana (S1)
Fakultas Syariah dan Hukum**

**Oleh:
MUSDAR ROZIQIN
NIM: 21133026**



**AHWAL AS-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2018 M/1439 H**

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **Tradisi *Salah Simalah* di Desa Teluk Pulai Luar Kabupaten Labuhanbatu Utara (Menurut Perspektif ‘*Urf*)**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu terjadinya perbedaan antara pelaksanaan peminangan yang dilaksanakan masyarakat dengan aturan-aturan syariat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menentukan obyek penelitiannya adalah masyarakat desa Teluk Pulai Luar Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berkompeten dalam hal peminangan. Data akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, dimana peneliti akan berhenti mengumpulkan data ketika data yang dikumpulkan sudah cukup. Dalam penelitian ini penulis menemukan orang yang pernah gagal bertunangan dan mengadakan *Salah Simalah* tersebut yaitu: Khoirun, Arifin, Deliansyah, Husinuddin. Selanjutnya penulis juga mewawancarai beberapa orang yang ada kaitannya dengan masalah tradisi ini yaitu: Ismail Tanjung, Muslim Munthe, M. Yusuf, Paidul, Ahmad Hudawi, Ahmad Ridwan, Kholizah, Umar Siddiq, Minimal Munawar. Dalam proses peminangan masyarakat Desa Teluk Pulai Luar mendahulukan untuk memberikan mahar sebelum akad, ketika peminangan itu dibatalkan oleh pihak lelaki, maka mahar tersebut tidak dapat diambil kembali sebaliknya jika pembatalan dari pihak perempuan maka mahar itu harus dikembalikan dua kali lipat sesuai dengan perjanjian saat penyerahan mahar yang dinamakan *Salah Simalah*. Memang dalam hal mendahulukan mahar sebelum akad tidak menjadi masalah walaupun pemberian mahar itu harusnya diberikan sewaktu akad sesuai defenisi mahar itu sendiri. Yang menjadi poin penting permasalahan tradisi ini adalah hangusnya mahar, sebab dalam ketentuan fiqh tidak membolehkan akan hal ini. Sebab mahar hanya boleh menjadi hak bagi seorang isteri apabila terjadi akad, sedangkan pada tradisi ini akad belum terjadi. Jika dikaitkan dengan ‘*urf* maka tradisi ini dapat digolongkan kepada ‘*urf fasid* karena dalam tradisi ini merugikan salah satu pihak. Pada realisasi tradisi ini lebih banyak yang dirugikan adalah pihak lelaki. Jika di analogikan tradisi ini sama seperti defenisi dari ‘*urf fasid* yaitu menghalalkan yang haram. Menurut peneliti kesalahan dalam tradisi ini adalah menjadikan mahar sebagai denda. Dalam pandangan pribadi peneliti tradisi tidak perlu dihapus, hanya saja jangan menjadikan mahar sebagai denda.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	11
E. Kajian Terdahulu.....	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB I IKAJIAN TEORI	15
A. Peminangan dan Ruang Lingkupnya	15
1. Pengertian.....	15
2. Dasar Hukum	16
3. Pembatalan dan Konsekuensinya	17
B. Mahar dan Ruang Lingkupnya.....	20
1. Pengertian.....	20
2. Dasar Hukum	21
3. Besaran, Macam-macam dan Waktu Penyerahan Mahar	23
4. Pembatalan Mahar.....	28
C. ‘ <i>Urf</i> dan Ruang Lingkupnya	29
1. Pengertian.....	29
2. Dasar Hukum	30
3. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	31
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Sekilas Tentang Desa Teluk Pulau Luar	34
B. Letak Geografis.....	35
C. Kondisi Demografi.....	36
D. Waktu Penelitian	39
E. Subjek Penelitian.....	39

F. Sumber Data.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	43
A. Pengertian Tradisi <i>Salah Simalah</i>	43
B. Tahapan Pernikahan dan Tradisi <i>Salah Simalah</i>	44
C. Pendapat Masyarakat Tentang Tradisi <i>Salah Simalah</i>	51
D. Tradisi <i>Salah Simalah</i> Dalam Perspektif ' <i>Urf</i> '.....	53
E. Analisis Tradisi <i>Salah Simalah</i>	58
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ajaran Islam yang bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia, bukan juga sekedar upacara sakral yang merupakan peredaran masa kehidupan manusia. Melainkan lebih dari itu pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya yang juga harus dikerjakan oleh umat Islam serta termasuk salah satu bukti ketundukkan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya.

Perintah tentang pernikahan didalam al-Quran disebutkan dalam surah an-Nur ayat 32 Allah berfirman:

اللَّهُ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنْ أَمَّا بِكُمْ عِبَادٌ كَرَّمَ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْكُمْ أَلَا يَسْمَىٰ وَأَنْكِحُوا

عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۚ مِنْ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”* (Q.S an-Nur 32).¹

Sebelum sampai kepada pernikahan menurut kebiasaan pada umumnya yang dilakukan oleh kedua belah pihak ada beberapa proses yang harus dilalui yaitu pinangan (*khitbah*), penyerahan hantaran sekaligus penetapan tanggal pernikahan serta hari pernikahan itu sendiri (akad nikah). Ketika seorang lelaki ingin menikahi seorang perempuan biasanya keluarga dari pihak lelaki datang

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: PT. Sabiq, 2009), h. 354

meminang kepada pihak perempuan. Saat pinangan tersebut diterima oleh pihak perempuan lazimnya pihak lelaki menyerahkan tanda berupa sebuah cincin. Tanda itu dimaksudkan sebagai pengikat bagi si perempuan untuk tidak menerima pinangan lelaki lain. Ini dikenal dengan istilah tunangan. Pada saat ini belum ditentukan tanggal pernikahan, namun sudah direncanakan kapan penyerahan hantaran untuk pelaksanaan pernikahan yang dimaksudkan.

Biasanya beberapa bulan sebelum rencana akad nikah pihak lelaki datang lagi untuk menyerahkan hantaran yang berisi seperangkat pakaian, perlengkapan kamar, uang hantaran (uang kasih sayang) dan lainnya serta tidak jarang pula turut diserahkan mahar yang telah disepakati oleh perempuan. Saat inilah biasanya disepakati hari pernikahan (akad nikah) dan setelah itu kedua belah pihak mulai mempersiapkan pernikahan baik secara administratif maupun secara adat dan kebiasaan yang berlaku hingga datangnya hari akad nikah tersebut. Ini akan berlangsung sesuai dengan rencana apabila tidak ada terjadi pembatalan oleh salah satu pihak, baik pihak lelaki maupun pihak perempuan.

Apabila masih dalam tahap pinangan pihak lelaki membatalkan pinangannya, maka tanda berupa cincin tersebut tidak dapat diminta kembali oleh lelaki. Sebaliknya jika yang membatalkan pinangan tersebut adalah pihak perempuan, maka tanda berupa cincin biasanya dikembalikan oleh pihak perempuan. Apabila pihak lelaki membatalkan setelah menyerahkan hantaran sebelum terjadinya akad nikah, maka apa yang diberikan oleh pihak lelaki pada saat hantaran baik berupa perlengkapan pakaian, perlengkapan kamar, uang kasih sayang dan lainnya tidak dikembalikan, sedangkan mahar apabila lelaki memberikannya juga maka harus dikembalikan oleh pihak perempuan. Sebaliknya

jika pihak perempuan yang membatalkan, pihak lelaki bisa meminta kembali seluruh hantaran begitu juga dengan maharnya.

Menurut Islam pinangan itu adalah *khitbah*nikah. Kata *khitbah* berasal dari kata *khataba*(خطب) yang berarti meminang atau melamar.² *Khitbah* dalam Ensiklopedi Islam Indonesia berarti lamaran atau pinangan, yaitu lamaran seorang laki-laki yang hendak memperisteri seorang perempuan, baik perempuan itu masih gadis atau sudah janda.³ Adapun hukum *khitbah* menurut jumhur ulama tidaklah wajib, namun menurut Daud hukumnya wajib. Jika saat melakukan *khitbah* pihak lelaki menyerahkan harta sebelum akad terlaksana dengan tidak di barengi dengan ungkapan(lafazh) apapun dan tidak dimaksudkan sebagai *tabarru'*(sumbangan), kemudian terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pihak lelaki maupun pihak perempuan maka pihak lelaki berhak menarik kembali apa yang diberikannya kepada perempuan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama Muhaqqiqun dalam kitab Fathul Mu'in yaitu:

لو خطب امرأة ثم ارسل او دفع بلا لفظ اليها مالا قبل العقد اي ولم يقصد التبرع ثم وقع الاعراض منها او منه رجع بما وصلها منه كما صرح به جمع محققون.⁴

Artinya: “Apabila seseorang laki-laki meminang wanita kemudian mengirimkan harta atau menyerahkan sejumlah harta kepadanya sebelum aqad terlaksana dengan tidak dibarengi suatu lafadz dan tidak dimaksudkan sebagai *tabarru'* (sumbangan), kemudian terjadi pengunduran diri baik dari pihak lelaki maupun dari pihak perempuan, maka sang lelaki berhak menarik kembali apa yang telah

²Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab- Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1984), h. 348

³Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan 1992), h. 555-556

⁴Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hijmin, 2004), h. 489-490

sampai ke tangan wanita dari tangannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh segolongan Ulama Muhaqqiqun.”

Apabila suami menyerahkan harta kepada istrinya sesudah akad, istrinya mendakwakan harta tersebut sebagai hadiah, lalu suami mendakwakan harta tersebut sebagai mahar, maka dibenarkan suami beserta dengan sumpahnya. walaupun pemberian tersebut(harta) tidak sejenis dengan mahar. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Zainuddin

ولو اعطاها مالا فقالت هدية وقال صداقا صدق بيمينه وان كان من غير جنسه.⁵

Artinya: “Apabila suami memberi istrinya harta, kemudian sang istri mendakwa harta itu “hadiah” dan suami mendakwa harta itu “shidaq”, maka dengan bersumpah suami dibenarkan, sekalipun harta itu tidak sejenis dengan shidaq.”

Namun, apabila pihak lelaki menyerahkan harta kepada perempuan pinangannya dan lelaki itu mendakwa harta ini aku jadikan sebagai mahar yang akan wajib dibayarnya setelah akad atau sebagai biaya pakaian yang akan wajib dia tanggung setelah akad dan *tamkin* sementara pihak perempuan mendakwa harta itu sebagai hadiah, maka menurut pendapat yang kuat dibenarkan perempuan. Karena tidak ada *qorinah* yang menunjukkan terhadap benarnya tujuan lelaki itu.

ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد او من الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكين وقالت بل هي هدية فالذي يتجه تصديقها اذلا قرينة

هنا على صدقه في قصده.⁶

⁵Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, h. 490

⁶Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, h. 490

Artinya: *“Apabila menyerahkan kepada wanita pinangannya, dan lelaki mendakwakan “harta itu saya jadikan sebagai shidaq yang akan wajib saya bayar setelah aqad atau sebagai biaya pakaian yang akan wajib saya tanggung setelah aqad dan tamkin, serta pihak wanita mendakwakan “tapi barang itu sebagai hadiah”, maka menurut pendapat yang berwajah adalah pihak wanita dibenarkan, sebab tidak ada dasar yang kuat untuk menunjukkan benarnya maksud hati sang lelaki.”*

Uraian di atas ada tiga pernyataan penting mengenai mahar yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Masalah pembatalan pinangan. Apabila lelaki menyerahkan harta baik mahar ataupun hadiah kepada perempuan sebelum akad, kemudian terjadi pembatalan baik dari pihak lelaki ataupun perempuan. Maka harta tersebut harus dikembalikan oleh perempuan.
2. Setelah akad suami memberi harta kepada istri, lalu saling mendakwa bahwa suami mendakwa harta tersebut mahar sedangkan istri mendakwa harta tersebut hadiah. Maka suami dibenarkan dengan bersumpah.
3. Peminangan tidak batal, hanya saja lelaki mendakwa harta tersebut sebagai mahar dan perempuan mendakwa harta tersebut sebagai hadiah. Maka pada masalah ini dibenarkan perempuan. Karena tidak adanya petunjuk akan benarnya maksud lelaki tersebut.

Berbeda halnya yang terjadi pada masyarakat desa Teluk Pulau Luar. Adapun proses seorang lelaki jika ingin menikah dengan seorang perempuan harus melalui beberapa tahapan. Pertama adalah marisik/meminang, pada tahap ini akan diketahui apakah pihak perempuan menerima pinangan tersebut atau tidak. Jawaban yang diterima oleh pihak laki-laki tidak selalu dapat secara spontan (saat itu juga). Kedua adalah *Manggantang Balanjo*, tahap ini pihak lelaki

datang kembali ke tempat perempuan untuk berembuk atau bermufakat (*bapokat*) tentang jumlah mahar, hantaran dan uang kasih sayang.

Ketiga adalah *Mangantar Balanjo* (mahar) maksudnya pihak lelaki datang mengantar hal-hal yang sudah disepakati pada manggantang balanjo sebelumnya. Pada tahap ini selain pihak lelaki pihak perempuan juga mengundang orang alim yang ada di kampung itu, orang yang mengerti adat, serta tetangga. Selain menyerahkan mahar dan yang telah disepakati lainnya yang sangat terpenting di sini adalah pembicaraan tentang waktu akad nikah dan perjanjian serta denda jika pihak lelaki atau pihak perempuan membatalkan pinangan. Jika pihak perempuan membatalkan pinangan maka harus mengembalikan dua kali lipat mahar yang telah diserahkan. Namun bila pihak lelaki yang membatalkan pinangan maka mahar yang diberikan ketika *mengantar balanjo* dianggap hangus. Perjanjian itulah yang dikenal dengan *Salah Simalah*. Keempat adalah hari akad nikah sebagaimana yang telah disepakati jika tidak terjadi pembatalan oleh pihak manapun.

Menurut masyarakat desa Teluk Pulau Luar prosesi sebelum pernikahan serta tradisi *Salah Simalah* yaitu perjanjian denda bagi yang membatalkan pinangan merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun dan dianggap adat (*urf*) yang harus diikuti serta tidak boleh dipertentangkan. Ini telah dialami oleh Khoirun 2013 Arifin tahun 2015, Deliansyah 2016 dan Husinuddin 2017. Keempat lelaki ini tidak dapat mengambil mahar yang telah mereka berikan karena pembatalan pernikahan yang mereka lakukan meskipun akad nikah belum terjadi. Padahal menurut Fiqh mahar akan menjadi hak perempuan jika sudah

terjadi akad, walaupun tradisi *Salah Simalah* ini dipandang sebagai '*urf*' maka apakah '*urf*' tersebut tergolong kepada '*urffasid* atau *shohih*.

Setelah uraian tentang bagaimana tahapan-tahapan yang dilalui bagi mereka yang ingin menikah, maka jelas *Salah Simalah* ini berbeda dengan ketentuan fiqh. Dalam fiqh ketika peminangan batal baik pembatalannya dari pihak manapun, maka harta yang berupa hadiah ataupun mahar harus dikembalikan. Sedangkan dalam tradisi *Salah Simalah* mahar yang diberikan sewaktu peminangan tidak dapat diambil lelaki jika ia membatalkan pinangannya, sebaliknya jika perempuan membatalkan pinangannya, maka mahar yang diberikan lelaki harus dikembalikan dua kali lipat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **"TRADISI SALAH SIMALAH DI DESA TELUK PULAI LUAR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (MENURUT PERSPEKTIF '*URF*')."**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan inti pokok masalah ini yaitu:

1. Bagaimana praktek *Salah Simalah* dalam prosesi pernikahan pada masyarakat desa Teluk Pulau Luar?
2. Bagaimana pandangan masyarakat desa Teluk Pulau Luar tentang tradisi *Salah Simalah*?
3. Bagaimana tradisi *Salah Simalah* dalam perspektif '*urf*'?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama sehingga penulis mengangkat judul “**TRADISI SALAH SIMALAH DI DESA TELUK PULAI LUAR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (MENURUT PERSPEKTIF ‘URF)**” adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek *Salah Simalah* dalam prosesi pernikahan pada masyarakat desa Teluk Pulai Luar
2. Untuk mengetahui dasar pemikiran masyarakat desa Teluk Pulai Luar tentang tradisi *Salah Simalah*.
3. Untuk mengetahui tradisi *Salah Simalah* dalam perspektif ‘urf.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan keilmuan dalam Hukum Islam terkhusus pada kasus-kasus yang bersumber dari adat istiadat pada masyarakat dalam hal ini termasuk tradisi *Salah Simalah* yang terkait dengan hukum Islam di dalamnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam menjawab tradisi *Salah Simalah* dalam perspektif hukum Islam.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.⁷ Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian yang digunakan

⁷Sutrisno Hadi. *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990) h. 4

adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti terjun langsung kelapangan agar mengetahui secara jelas tentang praktek tradisi *Salah Simalah* serta dikaitkan dengan hukum Islam dalam hal ini perspektif *'urf*.

Sebagai penelitian kualitatif penelitian ini tidak menggunakan pendekatan rumus dan simbol statistik, kemudian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu menggambarkan apa adanya realitas sosial yang terjadi di desa Teluk Pulai Luar Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang tradisi *Salah Simalah*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁸ Baik data itu yang diperoleh dari interview yang terdiri dari informan dan responden. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penelitian literatur primer, yang mengulas ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.⁹ Sehingga membantu memahami serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

⁸ Bambang Sanggono, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 36

⁹ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 11-12

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.¹⁰

Penulis dalam melakukan penelitian ini langsung melakukan pengamatan langsung atau observasi terhadap adanya perjanjian di dalam peminangan (*Salah Simalah*) dan orang-orang yang bersangkutan dengan tradisi *Salah Simalah* di desa Teluk Pulau Luar.

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 1. Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal, 2. Wawancara umum yang terarah dan 3. Wawancara terbuka yang standar.¹¹

Dengan menggunakan teknik wawancara di atas penulis mendapatkan jumlah data yang lebih banyak, sehingga mampu untuk melengkapi apa-apa yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian yang hampir sama sebelumnya telah dilakukan oleh Mulyadi dengan judul Pembatalan Peminangan Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya (Studi Analisis Terhadap Pasal 11-13 KHI Dan Hukum Islam). Kesamaannya adalah hilangnya hak lelaki terhadap mahar yang telah diberikannya sebelum akad. Sedangkan letak perbedaannya adalah Mulyadi menekankan pada analisis terhadap pasal 11-13 KHI sementara peneliti menekankan pada perspektif *'urf* dalam tradisi *Salah Simalah*.

¹⁰Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 224

¹¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 224

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan

Bab kedua merupakan kajian teori meliputi tentang peminangan dan ruang lingkungannya seperti pengertian, dasar hukum dan pembatalan dan konsekuensinya. Setelah itu dibahas mahar dan ruang lingkungannya seperti pengertian, dasar hukum, besaran, macam-macam dan waktu penyerahan mahar. Lebih lanjut lagi dibahas juga tentang '*urf*' dan ruang lingkungannya seperti pengertian, dasar hukum, macam-macam '*urf*'.

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian meliputi gambaran tentang lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kondisi geografis, kondisi demografi, waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Bab keempat merupakan temuan penelitian, seperti tahapan pernikahan dan tradisi *salah simalah*, pendapat masyarakat tentang tradisi *salah simalah*, tradisi *salah simalah* dalam perspektif '*urf*' dan analisis tradisi *salah simalah*.

Bab kelima merupakan penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peminangan dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa arab disebut *khitbah*.¹² Menurut etimologi *khitbah* berasal dari kata *خطب-يخطب-خطبا وخطبة* yang artinya meminang atau melamar.¹³ Secara terminologi menurut Sayyid Sabiq ialah:

طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس.¹⁴

Artinya: “*Meminang ialah meminta perempuan untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia.*”

Saat terjadinya *khitbah* pihak perempuan tidak boleh mengharuskan untuk menyerahkan sejumlah uang atau yang lainnya baik berupa seserahan, hadiah bahkan mahar ketika seorang lelaki hendak meminangnya akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak adat mengajukan adanya penyerahan sejumlah uang, seserahan bahkan mahar. Hal tersebut sebenarnya tidak masalah selagi tidak bertentangan dengan syariat.¹⁵

b. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum *khitbah* adalah:

1. Al-quran surat Al-baqarah ayat 235

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke-3 hlm. 556

¹³Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab- Indonesia* (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1984), hlm. 348

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2* (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 20

¹⁵Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib (Surakarta: Intermedia, 2005), hlm. 22

النِّسَاءِ خُطْبَةً مِنْ بَيْنِهِمْ عَرَّضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.....” (al-Baqarah ayat 235)¹⁶

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

وحدثني زهير بن حرب, ومحمد بن المثنى, جميعا عن يحيى القطان, قال زهير: حدثنا يحيى, عن عبيد الله, اخبرني نافع, عن ابن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع اخيه, ولا يخطب على خطبة اخيه, الا ان يأذن له.¹⁷

Artinya: “Dari Nabi SAW telah bersabda: janganlah seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan saudaranya, dan janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya.”

Kalangan Syafi’iyah menyatakan bahwa peminangan sangat dianjurkan sebab Nabi Muhammad SAW juga telah melakukannya. Rasulullah SAW meminang ‘Aisyah binti Abu Bakar R.A dan juga meminang Hafsah binti Umar R.A.¹⁸

c. Pembatalan dan Konsekuensinya

Islam tidak mengatur pembatalan *khitbah* (peminangan) dengan tegas. Hanya saja ketika terjadi pembatalan *khitbah*, maka pihak-pihak harus menjalankannya dengan cara yang baik sehingga pembatalan *khitbah* tersebut tidak berakibat pada permusuhan dan rusaknya *silaturrahim*. Hal ini mengingat permasalahan jodoh adalah merupakan ketentuan Allah SWT. Artinya meskipun

¹⁶Departemen Agama, *Al-Qur’an Al-Karim*, hlm. 48

¹⁷Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim bab Tahrimu al-Khitbatu ‘Ala Khitbati Akhihi Hatta Ya’zana*, hadis 1412 hlm. 1032

¹⁸Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, Jilid 4, terj. Abu Ihsan al-Atsari dan Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), hlm. 145

sudah dilakukan *khitbah* namun jika Allah berkehendak lain bisa saja batal karena persoalan jodoh tidak dapat diganggu gugat oleh manusia. Adapun sebab-sebab pembatalan *khitbah* yang biasanya terjadi antara lain adalah:

1. Adanya kebohongan dari salah satu pihak atau masing-masing pihak
2. Kurangnya syarat *kafaah*
3. Masa bertunangan yang terlalu lama
4. Tidak adanya kesepakatan awal
5. Menyembunyikan cacat bawaan
6. Pertentangan dari pihak keluarga dan
7. Melamar tanpa sepengetahuan keluarga.¹⁹

Pembatalan *khitbah* pada hakikatnya tidak memiliki konsekuensi apapun jika dalam *khitbah* itu pihak lelaki tidak memberikan harta berupa uang, seserahan bahkan mahar kepada pihak perempuan sewaktu *khitbah* dilakukan. Namun jika pihak perempuan mengharuskan pihak lelaki menyerahkan hal tersebut di atas saat *khitbah* sebagai tanda bahwa dirinya telah di *khitbah* maka memiliki beberapa konsekuensi.

Jika pihak lelaki memberikan harta pada saat peminangan, kemudian salah satu pihak baik lelaki atau perempuan membatalkan pinangannya maka harta yang diberikan baik itu hadiah atau mahar harus dikembalikan. Ungkapan ini dapat dilihat dalam kitab Fathul Mu'in:

¹⁹Adhi Fathi Abdullah, *Adab dan Tuntunan Meminang*, terj. Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004), hlm. 128-133

لو خطب امرأة ثم ارسل او دفع بلا لفظ اليها مالا قبل العقد اي ولم يقصد التبرع
ثم وقع الاعراض منها او منه رجع بما وصلها منه كما صرح به جمع
محققون.²⁰

Artinya: “Apabila seorang lelaki meminang wanita kemudian mengirimkan harta atau menyerahkan sejumlah harta kepadanya sebelum aqad terlaksana dengan tidak dibarengi suatu lafadz dan tidak dimaksudkan sebagai *tabaaru’* (hadiah), kemudian terjadi pengunduran diri baik dari pihak lelaki maupun dari pihak wanita, maka sang lelaki berhak menarik kembali apa yang telah sampai ke tangan wanita dari tangannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh segolongan Ulama *Muhaqqiqun*”

B. Mahar dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu (ج. مهر) المهر
yang artinya mahar, emas kawin.²¹ Mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan hal itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.” Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad.²²

Mahar secara terminologi menurut Nawawi al-Bantani adalah:

وهو ما وجب بعقد في المفوضة او وطء فيها²³

Artinya: “Mahar adalah sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad atau *senggama*”

Selain itu menurut Wahbah az-Zuhaili mahar adalah:

²⁰ Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, hlm 489-490

²¹ Ahmad Warson Munawir, *kamus Arab-Indonesia*, hlm 1363

²² Amar Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 184

²³ Nawawi Al-Bantani, *Nihayatu Zain* (Beirut, Dar Al-Fikri, 2002), hlm. 287

هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها او بالدخول بها

حقيقة.²⁴

Artinya: “*Mahar adalah harta yang menjadi hak istri atas suaminya disebabkan akad atasnya atau dukhul yang sebenarnya.*”

Uraian tentang pengertian mahar di atas jelas menyatakan bahwa mahar itu adalah pemberian dari seorang lelaki kepada seorang perempuan yang hendak dinikahinya, dan penyerahan maharnya adalah sewaktu akad berlangsung.

b. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum mahar adalah:

1. Al-Quran surat an-Nisa ayat 4:

﴿مَرِيئًا هَنِئًا فَاكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ خَلَّةٌ صَدُقْتِهِنَّ نِّسَاءً وَأَتُواْ

Artinya “*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika ia menyerahkan kamu sebagian dari maskawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*”. (Q.S. an-Nisa: 4)²⁵

2. Hadis Nabi Muhammad SAW:

حدثنا يحيى, حدثنا وكيع, عن سفيان, عن ابي حازم, عن سهل بن سعد, ان

النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد.²⁶

Artinya: “*Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki: nikahlah kamu walaupun dengan sebuah cincin dari besi*”.

²⁴Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Lebanon: Dar Al-fikri T.Th) hlm. 6758

²⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, hlm. 38

²⁶Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab al-Mahru bil-‘Urudhi wa Khotimin Min Hadidin, Nomor 5150, Juz 7, hlm. 20

عن انس رضى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل
عتقها صداقها. متفق عليه

Artinya: *“Dari Anas dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah memerdekakan Shafiyah dan menjadikannya maskawinnya.”*

وعن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, اعطها شيئاً, قال ما عندي شيء. قال: فاين درعك الحطمية؟ رواه ابو داود والنسائي, وصححه الحاكم.

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas diaberkata: ketika Ali kawin dengan Fathimah, Rasulullah bersabda kepadanya: Berilah dia sesuatu (maskawin). Ali menjawab: Saya tidak punya apa-apa. Beliau bersabda: Di mana baju besi Hutamiyah milikmu.”²⁷*

Dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis di atas bahwa adanya perintah bagi lelaki untuk memberikan mahar pada perempuan yang ingin dinikahinya dari seorang lelaki yang hendak menikahi seorang perempuan.

c. Besaran, Macam-macam dan Waktu Penyerahan Mahar

Berkaitan dengan besaran mahar, Islam tidak ada menetapkan batas maksimal dan minimal mahar. Mengenai besaran mahar hal ini diserahkan pada kemampuan calon suami dan disetujui oleh calon istri. Sejarah Islam membuktikan bahwa sebuah cincin besipun bisa dijadikan mahar jika itu merupakan kesanggupan atau kemampuan calon suami dan diterima oleh calon istri. Hal ini sebagaimana hadis Nabi tentang perintahnya terhadap seorang lelaki yang ingin

²⁷M. Ali, Terj. *Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), hlm. 472-473

menikahi seorang perempuan dengan mahar sebuah cincin besi yang harganya dianggap murah namun karena lelaki tersebut hanya memiliki cincin besi maka itupun dibolehkan oleh Rasul. Perintah Rasulullah SAW terhadap lelaki tersebut dapat dilihat dalam sabdanya:

حدثنا يحيى, حدثنا وكيع, عن سفيان, عن ابي حازم, عن سهل بن سعد, ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد.²⁸

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki: nikahlah kamu walaupun dengan sebuah cincin dari besi”.

Sisi yang lain ada juga ajaran Islam yang mengedepankan mahar dengan jumlah yang besar seperti perintah Nabi terhadap Ali R.A untuk menikahi putrinya dengan mahar baju besi perang dimana nilai baju besi perang pada zaman itu sangat mahal. Ini dapat dilihat dalam sabda Rasulullah SAW yaitu:

وعن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, اعطها شيئا, قال ما عندي شيء. قال: فاين درعك الحطمية؟ رواه ابو داود والنسائي, وصححه الحاكم.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas diaberkata: ketika Ali kawindengan Fathimah, Rasulullahbersabdakepadanya: Berilahdiesesuatu (maskawin). Ali menjawab: Sayatidakpunyaapa-apa. Beliau bersabda: Dimana baju besi Hutamiyahmilikmu.”²⁹

Adalagi yang menarik dalam ukuran besaran mahar dalam Islam yaitu memerdekakan seorang hamba sebagai mahar. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi

²⁸Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab al-Mahru bil-‘Urudhi wa Khotimin Min Hadidin, Nomor 5150, Juz 7, hlm. 20

²⁹M. Ali, Terj. *Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), hlm. 472-473

SAW saat menikahi Shafiyah. Ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas R.A:

عن انس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه.

Artinya: “*Dari Anas dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah memerdekakan Shafiyah dan menjadikannya sebagai maskawinnya.*”

Selain hadis-hadis di atas banyak lagi hadis Rasul yang berisi tentang besaran mahar salah satu misal adalah mahar mengajarkan al-Quran.³⁰

Menurut pendapat Syafi’iyyah dan Hanabilah tidak ada batasan besar kecilnya mahar serta besaran mahar itu tidak menjadi tolak ukur diterimanya mahar tersebut. mahar dapat diterima baik dia sedikit maupun banyak. Pendapat ini dapat dilihat dalam kitab Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu:

وقال الشافعية والحنابلة: لا حد لأقل حد المهر ولا تتقدر صحة الصداق بشيء،
فصح كون المهر مالا قليلا او كثيرا.³¹

Artinya: “*Tidak ada ketentuan bagi sedikitnya mahar dan tidak ada batasan sahnya mahar dengan demikian itu, maka sah mahar baik itu harta sedikit atau banyak*”

Uraian diatas tampak jelas menggambarkan bahwa besaran mahar tidak ditetapkan dalam Islam yaitu batas maksimal atau minimalnya. Tetapi yang menjadi ukuran di terimanya mahar adalah kemampuan calon suami serta persetujuan calon istri baik maksimal maupun minimal.

³⁰Shahih Bukhori, Hadis ke 5149

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 257

Mahar terbagi dua macam yaitu: mahar *musamma* dan mahar *misil*. Adapun yang dimaksud dengan mahar *Musamma* adalah mahar yang disebutkan dalam akad yang telah di sepakati. Ini dapat dilihat dalam kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu:

فهو ما سمي في العقد او بعده بالتراضي.³²

Artinya: “Mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan dalam akad atau setelah akad yang telah disepakati”

Sedangkan pengertian mahar *misil* adalah mahar seorang perempuan yang disamakan dengan saudara perempuannya yang sudah menikah dari pihak ayahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhailiy:

بأنه مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من جهة أبيها.³³

Artinya: “Mahar *misil* adalah mahar seorang perempuan yang disamakan dengan saudara perempuannya yang sudah menikah dari pihak ayahnya.”

Perbedaan antara mahar *musamma* dan mahar *misil* dalam pengertian di atas sangatlah jelas. Mahar *musamma* berupa sesuatu yang di serahkan calon suami kepada calon istri yang telah disepakati sesuai dengan kemampuan calon suami tersebut tanpa ada pertimbangan yang lainnya. Sementara pada mahar *misil* calon suami harus memberikan mahar kepada calon istrinya dengan menyesuaikan atau menyamakan maharnya dengan mahar saudara perempuannya dari pihak ayah.

³²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1984), hlm, 265-266

³³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, hlm. 266

Mengenai waktu penyerahan mahar, menurut Sayyid Sabiq lelaki boleh menyegerakannya (kontan) dan mengakhirkannya (hutang), atau menyegerakan sebagian dan mengakhirkan sebagian lainnya sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan pada masyarakat. Namun dianjurkan menyegerakan seluruh mahar tersebut. Pendapat ini dapat dilihat dalam kitab Fiqh as-Sunnah yaitu

يجوز تعجيل المهر وتأجيله, او تعجيل البعض و تأجيل البعض الآخر, حسب عادات الناس, و عرفهم... ويستحب تعجيل جزء منه.

Adapun dasar pemikirannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas yaitu:

لما روى ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ان يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا. فقال: ما عندي شيء. فقال فأين درعك الحطمية ؟ فأعطاه اياها.³⁴

Artinya: “Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas: bahwasanya nabi SAW telah melarang Ali menggauli Fathimah sampai Ali memberikan sesuatu padanya (mahar). Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu apapun. Nabi bersabda: Dimana baju perisai besi (al-hutmiyyah) milikmu? Maka Alipun menyerahkan baju perisai besi tersebut pada Fathimah.”

d. Pembatalan Mahar

Menurut Ibnu Qosim mahar boleh dibatalkan separuh jika terjadi perceraian sebelum *dukhul*:

ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر.³⁵

Artinya: “Dan gugur separuh mahar dengan *thalak* sebelum *dukhul*.”

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 139

³⁵Ibnu Qosim, *Fathul Qorib* (Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2005), hlm. 236

Dalam kitab Hasyiyatan Qolyubi wa ‘Umairoh juga ditemukan satu ‘ibarah bahwa:

الفرقة قبل وطء منها او بسببها كفسخه بعيها تسقط المهر وما لا كطلاق,
واسلامه وردته ولعانه وارضاع امه او امها يشطره.³⁶

Artinya: “*perceraian sebelum dukhul dari perempuan atau disebabkan perempuan seperti fasakh lelaki karena aib perempuan maka gugurlah seluruh mahar dan apa-apa yang tidak seperti thalak, dan islamnya lelaki, murtadnya lelaki, li’annya lelaki, sesusuan dengan ibunya lelaki atau lelaki sesusuan dengan ibunya perempuan maka jatuhlah mahar separuh.*”

Penjelasannya adalah pembatalan mahar itu ada dalam fiqh dan dibolehkan pada situasi-situasi tertentu, hanya saja pembatalannya terjadi setelah akad. Contohnya seperti ketika cerai sebelum dukhul maka mahar kembali separuh, dan jika perceraian itu disebabkan oleh perempuan seperti suami memfasakh istrinya karena ada aib yang terdapat pada istrinya maka batal mahar seluruhnya. Ketentuan ini berlaku ketika belum terjadi dukhul, jika itu sudah terjadi maka tidak ada pembatalan mahar.

C. ‘Urf dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian ‘Urf

‘Urf secara etimologis berasal dari kata عرف-يعرف sering diartikan³⁷ المعروف berarti yang dikenal atau sesuatu yang dipandang baik. Adapun secara terminologi menurut Wahbah Zuhailly adalah:

³⁶Ahmad Salamah Qolyubi wa Ahmad ‘Umairoh, *Hasyiyatan Qolyubi wa ‘Umairoh* (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), hlm. 286-287

³⁷Su’di Abu Habibi, *al-Qamus al Fiqh Lughotan wa Istilahan* (Suriah: Darul Fikri, 1988), hlm. 249

العرف هو كل ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، او قول
تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، و لا يتبادر غيره عند سماعه.³⁸

Artinya: “*’Urf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang berulang-ulang dilakukan manusia dan telah lama berjalan serta telah menyatu dalam kehidupan mereka, atau perkataan yang dikenal dengan makna yang khusus tidak mengikat pada arti bahasa, dan tidak mengetahui selain yang mendengarnya”.

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:

هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، او فعل، او ترك، ويسمى العادة.³⁹

Artinya: “*’Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah lama berjalan baik itu perkataan, perbuatan maupun larangan, ‘urf dinamakan juga dengan adat.”

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa ‘urf itu adalah adat kebiasaan manusia yang telah lama ada baik itu dari segi perkataan, perbuatan bahkan larangan tersebut.

b. Dasar Hukum ‘Urf

Adapun dasar hukum ‘urf adalah:

1. Al-quran:

﴿الْجَاهِلِينَ عَنْ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأُمْرَ الْعَفْوَ خُذِ﴾

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*” (Q.S al-A’raf ayat 199)⁴⁰

2. Hadis Nabi

³⁸Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fi Ushulil Fiqh* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1999), hlm. 97

³⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), hlm. 89

⁴⁰Departemen Agama, *al-Qur’an Al-Karim*, hlm. 237

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.⁴¹

Artinya: “*Sesuatu yang dinilai muslimin baik, maka baik pula menurut Allah.*”

Dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan yang sudah lama berjalan di kalangan masyarakat dan bernilai baik (mengandung manfaat) dibolehkan untuk mengerjakannya, sebaliknya yang bernilai buruk (mengandung kerusakan) tidak boleh dikerjakan sebab Islam turun untuk memberikan maslahat kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan.

c. Macam-macam ‘Urf

‘Urf terbagi dua yaitu ‘urf shohih dan ‘urf fasid.

فا العرف الصحيح هو ما تعارفه الناس, ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا.⁴²

Artinya: “*‘Urf shohih atau benar adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan yang wajib.*”

Adapun contohnya adalah: meminta pekerjaan pada orang lain, membagi maskawin menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima maskawin dari suaminya, dan adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar.⁴³

⁴¹Jalaluddin Assuyuthi, *Al-Asybah Wan Nazhoir* (Riyadh: Nazaru Mushtafa Al-Baz, 1997), hlm. 148-149

⁴²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 89

⁴³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj Faiz el Muttaqin, hlm. 117. Hal senada diungkapkan oleh Wahbah Zuhailiy, *Al-Wazij fi Ushuli Fiqhi* (Suriah: Darul Fikri, 1999), hlm. 98.

العرف الفاسد هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع او يحل المحرم او يبطل

الواجب.⁴⁴

Artinya: “*‘urf fasid yaitu sesuatu adat atau kebiasaan yang sudah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara’ yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.*”

Contohnya adalah adat kebiasaan mayoritas manusia yang tidak baik yaitu memakan riba, perjanjian yang memaksa.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf status hukum *‘urf shohih* adalah wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara’* dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Apa saja yang sudah dikenal dan terbiasa dilakukan oleh masyarakat itu menjadi kebutuhan, konsensus, dan kemaslahatan bagi mereka. Hal ini selama *‘urf* atau adat tersebut tidak bertentangan dengan *syara’* maka wajib dilestarikan. Allah juga memperhatikan yang benar dari adat orang arab dalam penetapan hukum seperti disyaratkannya kafaah atau kemampuan bagi yang mau menikah dan *‘ashobah* itu mendapat bagian dalam warisan.

Menurut mayoritas ulama *‘urf* atau adat dinilai sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum. Imam Malik dalam penetapan hukumnya seringkali melihat pada adat atau kebiasaan masyarakat Madinah. Sementara Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda dalam menetapkan hukum tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi’i merubah beberapa ketentuan hukumnya

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 89

yang telah ditetapkannya di Mesir ketika ia berada di Baghdad dan ini dikenal dengan (*Qoul Qadim dan Qoul Jadid*).⁴⁵

⁴⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj Faiz el Muttaqin, hlm. 118

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Desa Teluk Pulau Luar

Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara secara topografi termasuk dalam kategori daerah dataran rendah yang dialiri Sungai Kualuh. Desa ini berdiri pada tahun 1960, awalnya berada dalam wilayah Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian pada tahun 1999 Kecamatan Kualuh Hilir dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Mei 1999.

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya memiliki tradisi yang unik dan berbeda begitu jugalah di desa Teluk Pulau Luar. Salah satu tradisi unik dan menarik yang sampai saat ini masih berjalan adalah tradisi *Salah Simalah*. Tradisi ini adalah denda bagi yang membatalkan pinangan berupa hangusnya seluruh yang diserahkan saat peminangan termasuk mahar meskipun belum terjadi pernikahan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menjadikan desa ini sebagai lokasi penelitian tentang tradisi *Salah Simalah*.

B. Letak Geografis

Adapun batas-batas wilayah Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Tanjung LeidongKec. Kualuh Leidong
- b. Sebelah Timur : Desa Tanjung MangedarKec. KualuhHilir
- c. Sebelah Selatan : Desa Teluk Pulai DalamKec. KualuhLeidong
- d. Sebelah Barat : Desa Air Hitam/Desa Kelapa Sebatang Kec. KualuhLeidong

a. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Desa TelukPulaiLuaradalah 52,79 KM²yang terdiri dari : Permukiman 30 Ha, Persawahan350 Ha, Kuburan 4 Ha, Perkebunan 1.693 Ha, Lahan lainnya3.202 Ha. Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa TelukPulaiLuarterbagi ke dalam 4 wilayah dusun yaitu :DusunSempurna, DusunTeladan, DusunBahagia dan DusunPerdamaian.

C. Kondisi Demografi

a. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Desa Teluk Pulai Luar terus mengalami pertumbuhan penduduk. Sesuai dengan data primer tahun 2016 penduduk desa Teluk Pulai Luar berjumlah2.527 orang. Dengan luas wilayah 52,79 km², kepadatan penduduk Desa Teluk Pulai Luar yaitu 81/km².

b. JumlahPenduduk

1. DistribusiJumlahPendudukJenisKelamin

Tabel 1
DistribusiJumlahPendudukBerdasarkanJenisKelamin

NO	DUSUN	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	DUSUN SEMPURNA	216	208
2	DUSUN TELADAN	321	327
3	DUSUN BAHAGIA	786	534
4	DUSUN PERDAMAIAN	73	62
TOTAL		1.396	1.131

**sumber Keputusan Kepala Desa Tahun 2016*

2. Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2
DistribusiJumlahPendudukberdasarkanTingkatPendidikan

No	Dusun	Tingkat Pendidikan				
		Pra SD	SD	SMP	SMA	DIPLOMA, S1, S2 DAN S3
1	SEMPURNA	43	100	59	43	15
2	TELADAN	52	221	87	25	10
3	BAHAGIA	75	420	129	36	12
4	PERDAMAIAN	20	20	15	8	1
TOTAL		190	761	290	112	38

3. Menurut Pekerjaan

Tabel 3
DistribusiJumlahPendudukBerdasarkanTingkatPekerjaan

N O	DUSUN	TINGKAT PEKERJAAN					
		Petani	Pedagang	PNS	Supir	Peternak	DLL
1	SEMPURNA	67	6	2	-	1	-
2	TELADAN	101	8	5	-	1	-
3	BAHAGIA	69	10	1	2	-	-
4	PERDAMAIAN	35	2	1	3	2	-
TOTAL		272	26	9	5	4	-

4. Menurut Agama

Tabel4
DistribusiJumlahPendudukberdasarkan agama

NO	DUSUN	AGAMA			
		Islam	Katholik	Protestan	DLL
1	DUSUN SEMPURNA	424	-	-	-
2	DUSUN TELADAN	648	-	-	-
3	DUSUN BAHAGIA	1.320	-	-	-
4	DUSUN PERDAMAIAN	65	70	-	-
TOTAL		2.457	70	-	-

c. Sumber Daya Alam

1. Kondisi Topografi,

Desa TelukPulaiLuarmemiliki relief daerah dataran. Desa TelukPulaiLuar merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian dan keluatan. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis penunjang ekonomi

masyarakat seperti nelayan, dan tanaman-tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah kelapa sawit dan padi. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 30 °C.

2. Potensi Lahan Pertanian

Desa TelukPulaiLuardengan luas Tanah 52,79 KM² yang terdiri dari tanah sawah seluas 250 Ha dan tanah Perkebunan seluas 1.693 Ha. Secara keseluruhan sawah tersebut merupakan sawah irigasi teknis. Sedangkan lahan bukan sawah diperuntukkan untuk tanaman kelapasawit.

D. Waktu Penelitian

Penelitian tentang Tradisi *Salah Simalah* di desa Teluk Pulai Luar Kabupaten Labuhanbatu Utara (Perspektif '*Urf*') ini dilaksanakan pada 20 Oktober 2017 sejak disahkannya proposal penelitian tersebut hingga selesai.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang. Dengan demikian subjek penelitian pada umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia.⁴⁶ Terkait penelitian tradisi *Salah Simalah* yang menjadi subjeknya adalah orang yang melakukan peminangan, kemudian yang

⁴⁶Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 152

membatalkan pinangan, perempuan yang dipinang serta orang yang terlibat dalam hal peminangan.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴⁷ baik data itu yang diperoleh dari interview yang terdiri dari informan dan responden. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penelitian literatur primer, yang mengulas ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.⁴⁸ Sehingga membantu memahami serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam peminangan, dalam hal ini adalah pihak lelaki dan pihak perempuan, tokoh adat dan tokoh agama. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku yang berkaitan dengan hukum Islam baik fiqh(peminangan) maupun ushul fiqh('urf).

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang

⁴⁷Bambang Sanggono, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36

⁴⁸Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 11-12

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁹ Penulis dalam melakukan penelitian ini langsung melakukan pengamatan atau observasi pada prosesi peminangan terkait didalamnya perjanjian dalam peminangan tersebut serta prosesi pembatalan peminangan yang dikenal dengan tradisi *Salah Simalah*.

2. Metode Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 1. Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal, 2. Wawancara umum yang terarah dan 3. Wawancara terbuka yang standar.⁵⁰ Penggunaan teknik wawancara diatas dimaksudkan agar penulis mendapatkan jumlah data yang lebih banyak, sehingga mampu untuk melengkapi apa-apa yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini penulis lebih menggunakan teknik wawancara yang pertama yaitu dengan melakukan pembicaraan informal agar responden tidak merasa canggung.

⁴⁹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 224

⁵⁰Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Tahapan Pernikahan dan Tradisi *Salah Simalah*

Masyarakat desa Teluk Pulau Luar dalam melaksanakan pernikahan harus melalui beberapa tahapan. Masing-masing tahapan itu memiliki istilah tersendiri. Menurut bapak Marzuki bila seseorang akan melaksanakan pernikahan maka ia harus melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Meminang/*Marisik*

Pada tahap ini utusan dari keluarga laki-laki datang kepada keluarga wanita untuk menyampaikan maksud mereka ingin meminang. Upaya peminangan ini dapat dipastikan dengan menggunakan orang-orang utusan. Sulit sekali menemukan peristiwa peminangan yang langsung dilaksanakan oleh orang tua pihak laki-laki.

Saat dilakukan peminangan pihak wanita memberi jawaban baik itu diterima atau ditolaknya pinangan tersebut. tetapi tidak jarang pihak perempuan menunda penerimaan pinangan tersebut karena pihak perempuan akan bermufakat terlebih dahulu. Setelah pihak perempuan melakukan mufakat dan pinangan diterima (umpamanya) maka keputusan tersebut akan disampaikan melalui utusan kepada pihak laki-laki.

2. *Manggantang Balanjo*

Setelah pinangan pada tahap pertama disetujui (diterima), maka pada tahap selanjutnya pihak laki-laki akan memanggil pihak keluarga atau orang terdekat mereka untuk diajak berembug atau bermufakat (*bapokat*). Adapun tujuan

bapokat tersebut adalah untuk menentukan berapa mahar tertinggi yang dapat mereka sanggupi.

Setelah hasil *bapokat* dapat disimpulkan maka diutuslah beberapa utusan kepada keluarga perempuan untuk menanyakan berapa mahar yang akan dibebankan kepada laki-laki yang meminang.

Setelah melalui proses pembicaraan dan pendapat antara kedua belah pihak telah bulat tentang nilai mahar maka ditentukanlah waktu penghantaran mahar tersebut yang dikenal dengan istilah *mangantar balanjo*.

3. *Mangantar Balanjo* (Mahar)

Pada tahap *mangantar balanjo* (mahar) ini kembali beberapa orang keluarga dekat diundang dan jiran tetangga. Tujuan undangan tersebut adalah untuk beramai-ramai mengantarkan sejumlah *uang balanjo* (mahar) yang telah disepakati sebelumnya. Setelah uang tersebut dihitung dengan dipersaksikan oleh segenap yang hadir ditempat itu maka pihak lelaki akan mengajukan perjanjian *Salah Simalah* yaitu denda bagi siapa yang membatalkan pinangan, dan yang dijadikan denda adalah hantaran sewaktu *mangantar balanjo* yang termasuk juga di dalamnya mahar.

Setelah kesepakatan *Salah Simalah* selesai maka dimusyawarahkanlah oleh kedua pihak tentang waktu akad nikah yang biasa mereka sebut dengan istilah *mangucap*. Sejak uang *balanjo* diberikan kepada perempuan maka saat itu antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang dianggap telah terikat janji pernikahan yang disebut dengan *batunangan* (dalam masa bertunangan).

4. *Mangucap* / Ijab Qobul

Pengantin laki-laki akan diarak beramai-ramai menuju kediaman pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah sesuai dengan syariat islam.⁵¹ Tahapan-tahapan diatas akan terjadi dengan baik jika tidak ada salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan untuk membatalkan janji pernikahannya, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak membatalkannya maka konsekuensi dari perjanjian dalam *Salah Simalah* akan berlaku sesuai perjanjian kedua belah pihak sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Pada kasus tradisi *Salah Simalah* ini peneliti menemukan orang-orang yang gagal menuju pernikahan yang disebabkan oleh bermacam-macam alasan. Karena alasan-alasan tersendiri maka salah satu pihak telah memutuskan untuk membatalkan pinangannya. Berikut akan penulis paparkan orang-orang yang membatalkan pinangannya beserta alasan-alasan mereka sesuai dengan apa yang telah di wawancarai:

1. Khoirun bertunangan pada tahun 2013

Khoirun mengakui pernah membatalkan pinangannya dengan Wirdatul Huda. Sikap yang di ambil oleh Khoirun disebabkan calon wanitanya terlalu mudah dibawa oleh lelaki lain sehingga menimbulkan kecemburuan baginya. Jadi bagaimanapun dia merasa bahwa calonnya tidak pantas untuk dijadikan sebagai istri, sebab itulah dia membatalkan pinangannya. saat ditanya tentang alasan kenapa ia membatalkan pinangannya dia menjawab “alasan saya membatalkan pinangan saya adalah karena saya pernah melihat dia (tunangannya) berjalan bersama lelaki lain. Maka setelah saya pikir lebih baik memutuskan pinangan tersebut.” Khoirun menyadaripemutusan pinangan yang dilakukannya akan

⁵¹ Marzuki, Tokoh Adat Masyarakat, Teluk Pulau Luar, Wawancara Pribadi, 07 September 2017.

menyalahi perjanjiannya saat peminangan dan dia harus merelakan mahar yang telah diberikannya pada saat peminangan. Pemutusan pinangan langsung di disampaikan oleh Khoirin kepada Wirdatul Huda.

2. Arifin bertunangan pada tahun 2015,

Arifin juga pernah membatalkan pinangannya dengan seorang perempuan yang bernama Nafsiyah. Pemutusan pinangan tersebut seperti penjelasan Arifin mempunyai alasan tersendiri. Alasan yang disebutkan olehnya adalah bahwa dia telah menemukan perempuan yang dirasa lebih pantas menjadi istrinya. Begini ungkapannya saat ditanya alasan mengapa ia membatalkan pinangannya “Alasan saya sebenarnya diwaktu pertunangan kami, saya menemukan perempuan lain yang menurut saya lebih pantas menjadi istri saya. Maka saat itu saya memutuskan pinangan kami.” Pada saat memutuskan pinangannya pihak keluarga Arifin mengirim utusan kepada pihak perempuan untuk membicarakan tentang pemutusan pinangan oleh Arifin dan akibat dari pemutusan tersebut seperti hangusnya mahar dan apa-apa yang telah diberikan kepada perempuan yang dipinangnya sebagai sanksi dari pemutusan tersebut.

3. Deliansyah bertunangan pada tahun 2016

Deliansyah juga salah seorang yang memutuskan pinangannya dengan perempuan yang bernama Arbiana. Alasannya karena dia mengetahui bahwa pinangannya itu telah menjalin hubungan dengan lelaki lain (pacaran), maka dia merasa cukup bodoh bertunangan dengan perempuan yang menjalin hubungan dengan lelaki lain. Sebab itulah dia memutuskan pinangannya dengan langsung menjumpai kedua orang tua perempuan tersebut dan merelakan mahar yang pernah diberikannya saat peminangan. Alasannya saat ditanya adalah “Alasan

saya membatalkan pinangan saya karena banyaknya cerita dari sahabat-sahabat saya yang mengatakan bahwa dia (calon istri) telah menjalin hubungan dengan lelaki lain. Oleh karena itulah saya memutuskan hubungan pertunangan kami.”

4. Husinuddin bertunangan pada tahun 2017.

Mengenai kasus pemutusan pinangan yang di alami Husinuddin dengan Azlina sama dengan kasus Khoirin, hanya saja pada saat pemutusan pinangannya pihak keluarga Husinuddin mengirim utusan kepada pihak perempuan untuk membicarakan sebab akibat dari pemutusan pinangan tersebut. Ungkapannya saat ditanyai alasan memutuskan pinangannya “Alasan saya membatalkan pinangan saya karena dia selingkuh. Tapi dia tetap masih bertunangan dengan saya. Bahkan dia tidak mau memutuskan hubungan pinangan kami. Karena saya tidak tahan dengan perbuatannya, maka saya putuskan pinangan tersebut.”

Hampir semua kasus yang tentang batalnya pernikahan karena setelah mengetahui sifat buruk salah satu pasangannya, sehingga merasa tidak mungkin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tapi pada kasus seperti Khoirin, Deliansyah dan Husinuddin perempuan seolah sengaja tidak memutuskan pertunangannya karena takut di kenakan denda.

Salah Simalah, dalam kebiasaan penduduk desa Teluk Pulai Luar, adalah sebuah ikatan perjanjian antara pihak lelaki yang meminang dengan pihak perempuan yang dipinang. Perjanjian tersebut terkait tentang hangusnya atau tidak kembalinya mahar yang telah diberikan bila terjadi pembatalan pernikahan.

Adat kebiasaan *Salah Simalah* ini telah berlangsung cukup lama dan sampai saat ini prakteknya masih banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat desa Teluk Pulai Luar. Sehingga tidak sulit untuk melacak peristiwa-peristiwa

adanya perjanjian *Salah Simalah*. Bahkan kita masih dapat menemui orang-perorang yang pernah mengikat diri dengan perjanjian *Salah Simalah* sekaligus melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, dan akhirnya harus merelakan uang mahar yang telah diberikannya sebelum akad itu hangus (tidak kembali).

M. Nazri Tanjung, salah seorang tokoh masyarakat, yang selalu ditunjuk sebagai pembicara dalam banyak peristiwa peminangan mengatakan bahwa *Salah Simalah* ini berlaku dengan ketentuan: “Barangsiapa yang mungkir janji (menyalahi janji) setelah terjadinya kesepakatan tentang rencana pernikahan dalam suatu peminangan, maka harus membayar denda yang telah ditetapkan bersama. Biasanya yang dijadikan denda adalah mahar yang diberikan setelah peminangan. Apakah mahar itu pulang seluruhnya atau separuhnya atau hangus sama sekali, atau dengan pengembalian dua kali lipat ”.⁵²

Sebagian masyarakat merasa bahwa *Salah Simalah* merupakan sebuah keharusan untuk menjaga agar tidak terjadi pembatalan sepihak dalam rencana pernikahan yang telah sama-sama disetujui. Sehingga, sampai saat ini, tidak ada pembicaraan terbuka yang dapat didengar sebagai bentuk keluhan dan keberatan mereka terhadap adanya perjanjian *Salah Simalah* di desa Teluk Pulai Luar. Boleh dikatakan bahwa tradisi *Salah Simalah* telah diterima secara umum oleh masyarakat setempat.

Dengan cukup yakin salah seorang tokoh adat yang bernama Ismail Tanjung mengatakan “Ini merupakan bentuk jaminan agar tidak ada yang bermain-main dengan pernikahan. Bila tidak dibuat demikian, kita khawatir orang

⁵²M. Nazri Tanjung, Tokoh Adat Masyarakat, Wawancara Pribadi, Teluk Pulai Luar, 07 September 2017

yang telah melakukan perjanjian untuk menikah akan mudah saja membatalkannya tanpa memikirkan akibatnya”.⁵³

B. Pendapat Masyarakat tentang Tradisi *Salah Simalah*

Hampir seluruh masyarakat desa Teluk Pulai Luar yang bertunangan melakukan tradisi ini terutama orang yang bertunangan dengan jangka waktu yang lama, hanya saja banyak yang berhasil sampai ke jenjang pernikahan. Setelah observasi penulis ada juga beberapa masyarakat yang tidak mengetahui istilah *Salah Simalah* ini, tetapi menjalaninya sewaktu peminangan.

Masyarakat adat pada umumnya memiliki tata cara tersendiri dalam pelaksanaan pernikahan. Begitu juga dengan masyarakat desa Teluk Pulai Luar, hanya saja ada pelaksanaan adat yang dapat dibenarkan atau diterima agama dan ada juga pelaksanaan adat yang tidak dibenarkan atau diterima oleh agama karena bertentangan atau berbeda jauh dengan aturan syari'at.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat diketahui lebih jauh tentang pendapat masyarakat pada tradisi *Salah Simalah* yang terdapat di desa Teluk Pulai Luar.

Paidul, sebagai masyarakat setempat memberikan penjelasan bahwa: “*Salah Simalah* merupakan adat kebiasaan yang berlaku di desa ini sejak lama sehingga kita tak dapat mengetahui kapan dan siapa yang mula-mula melaksanakannya. Sampai hari ini beberapa contoh kasus dan orang yang mengalaminya masih dapat kita temui. Bila ditinjau dari segi hukum Islam kita tidak menemukan dasar penetapan kebiasaan tersebut. Namun kita yakin, masuknya kebiasaan tersebut merupakan pengaruh dari kedudukan *Pertua-pertua*

⁵³Ismail Tanjung, Tokoh Adat Masyarakat, Wawancara Pribadi, teluk Pulai Luar, 07 September 2017

kampung yang kerap dilibatkan dalam acara peminangan dan mereka mendahulukan pertimbangan akal saja”.⁵⁴

Ahmad Hudawi juga menjelaskan bahwa “*Salah Simalah* ini sebenarnya memberatkan bagi orang yang ingin memutuskan ikatan pinangannya, boleh jadi gara-gara denda tersebut seseorang tidak berani memutuskannya karena takut dikenankan denda. Maka inilah yang menjadi tujuan dari tradisi tersebut.”⁵⁵

Ismail Tanjung mengatakan “Ini merupakan bentuk jaminan agar tidak ada yang bermain-main dengan pernikahan. Bila tidak dibuat demikian, kita khawatir orang yang telah melakukan perjanjian untuk menikah akan mudah saja membatalkannya tanpa memikirkan akibatnya.”⁵⁶

Muslim Munthe juga termasuk salah seorang tokoh adat menjelaskan bahwa “Denda yang ada dalam *Salah Simalah* ini wajar saja jika dilihat sebab yang di akibatkan oleh putusnya peminangan tersebut. Jika dilihat efek dari putusnya pinangan itu sangat besar. Kita contohkan ketika seorang lelaki memutuskan untuk membatalkan pinangannya dengan seorang perempuan, maka bisa saja perempuan tersebut merasa malu dan merasa bahwa marwahnya direndahkan. Bahkan efek yang sangat besar adalah menimbulkan prasangka buruk terhadap lelaki lain yang akan meminangnya. Maka dari itulah tradisi ini dilakukan”⁵⁷

Iwan Fauzi salah seorang tokoh masyarakat memberikan komentar terhadap tradisi ini “*Salah Simalah* ini sebenarnya mempunyai tujuan yang bagus

⁵⁴Paidul, Masyarakat Desa Teluk Pulau Luar, Wawancara Pribadi, 13 Nov 2017.

⁵⁵Ahmad Hudawi, Masyarakat Desa Teluk Pulau Luar, Wawancara Pribadi, 13 Nov 2017.

⁵⁶Ismail Tanjung, Tokoh Adat Masyarakat, Wawancara Pribadi, Teluk Pulau Luar, 07 September 2017

⁵⁷Muslim Munthe, Tokoh Adat Masyarakat, Wawancara Pribadi, Teluk Pulau Luar, 07 September 2017

jika dilihat. Akan tetapi yang menjadi masalah ketika seorang yang dalam masa bertunangan membuat ulah (tidak merasa bahwa ia ada ikatan pertunangan dengan orang lain) dan ia tidak mau memutuskan tunangannya. Kita contohkan dalam hal ini lelaki bertunangan dengan seorang perempuan, lalu perempuan tersebut membuat ulah dan tetap tidak mau memutuskan pinangannya. maka si lelaki yang merasa tidak tahan dengan perbuatan perempuan yang dipinangnya akan memutuskan pinangan mereka, dalam hal ini berarti yang dikenakan denda adalah lelaki tersebut. Apakah ini adil? Tentu ini tidak adil.”⁵⁸

Ahmad Ridwan salah seorang masyarakat menjelaskan pendapatnya tentang tradisi ini “Tradisi ini sebenarnya demi menjaga hubungan kekeluargaan kedua belah pihak, maka dibuatlah sebuah perjanjian yang memberatkan kedua belah pihak untuk berpisah. Sebab jika kedua calon tersebut pisah maka boleh jadi kedua belah keluarga tersebut saling bermusuhan. Maka untuk mempersulit kedua pasangan ini berpisah dibuatlah denda bagi siapa yang membatalkan pinangan tersebut.”

Kholizah menjelaskan bahwa “*Salah Simalah* ini boleh saja, karena dilihat dari dulu tidak ada yang mempermasalahkan adat ini. Walaupun didalam adat ini termasuk yang dijadikan denda tersebut adalah mahar yang diberikan oleh lelaki sewaktu peminangan. Jadi intinya kalau sama-sama ikhlas mengapa harus dipersoalkan,”⁵⁹

Umar Siddiq menyatakan bahwa “*Salah Simalah* ini bagus untuk setiap pasangan yang bertunangan, sebab karena adanya denda pada *salah simalah* ini membuat kedua belah pihak akan berpikir secara matang pada ikatan yang mereka

⁵⁸Iwan Fauzi, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Teluk Pulau Luar, 07 September 2017

⁵⁹Kholizah, Wawancara Pribadi, Teluk Pulau Luar, 07 September 2017

jalani berdua. Disamping itu juga karena adanya denda ini membuat para pihak saling berpikir satu sama lain, jika tidak ada denda ini bisa saja salah satu pihak semena-mena terhadap pihak lainnya.”⁶⁰

M. Yusuf seorang tokoh adat menjelaskan “Sebenarnya *Salah Simalah* ini dulu dibuat karena pada umumnya semua masyarakat saling berhubungan tali kekeluargaan. Mereka juga sangat suka menjodohkan sanak pamili mereka, oleh sebab itu dibuatlah denda dalam waktu peminangan supaya yang dijodohkan berat untuk memutuskan pinangan mereka. Jika tidak dibuat demikian ketika mereka memutuskan pertunangan mereka, besar kemungkinan tali kekeluargaan kedua belah pihak rusak gara-gara putusnya pinangan sanak pamili mereka. maka denda tersebut untu mencegahnya.”⁶¹

Minimal Munawar “Tradisi ini berlangsung cukup lama walaupun ada sebagian masyarakat yang tidak tahu nama istilah ini, apalagi kaum muda. Tradisi ini sangat mempengaruhi pikiran bagi orang bertunangan agar lebih hati-hati dalam menjaga perasaan satu sama lain, sebab denda dalam tradisi inilah membuat kedua belah pihak untuk lebih serius meneruskan ke jenjang pernikahan mereka.”⁶²

Pendapat dari orang-orang yang gagal menuju pernikahan terhadap *Salah Simalah* ini tidak begitu merasa diberatkan sebab mereka juga mengetahui bahwa ini memang ada sudah lama, maka tidak perlu di persoalkan. Khoirun, Arifin, Deliansyah dan Husinuddin mereka semua merasa bahwa denda yang ada dalam *Salah Simalah* tidak menjadi satu persoalan.

⁶⁰Umar Siddiq, Wawancara Pribadi, Teluk Pulau Luar, 07 September 2017

⁶¹M. Yusuf, Tokoh Adat Masyarakat, Wawancara Pribadi, Teluk Pulau Luar, 07 September 2017

⁶²Minimal Munawar, Wawancara Pribadi, Teluk Pulau Luar, 07 September 2017

Maka dapat dipastikan bahwa *Salah Simalah* ini merupakan tradisi yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan mereka yang bertunangan ke jenjang pernikahan menurut masyarakat, dan mereka pada umumnya juga tidak merasa terbebani oleh denda tersebut.

C. Tradisi *Salah Simalah* Menurut Perspektif ‘*Urf*

Setelah penulis memaparkan tentang *Salah Simalah* seperti yang diatas maka apakah *Salah Simalah* ini dapat digolongkan kedalam ‘*urf* atau tidak. Untuk mengetahuinya maka perlu kajian tentang ‘*urf*. Menurut Wahbah Zuhaily ‘*urf* adalah:

العرف هو كل ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، او قول تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، و لا يتبادر غيره عند سماعه.⁶³

Artinya: “‘*Urf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang berulang-ulang dilakukan manusia dan telah lama berjalan serta telah menyatu dalam kehidupan mereka, atau perkataan yang dikenal dengan makna yang khusus tidak mengikat pada arti bahasa, dan tidak mengetahui selain yang mendengarnya”.

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:

هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، او فعل، او ترك، ويسمى العادة⁶⁴

Artinya: “‘*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah lama berjalan baik itu perkataan, perbuatan maupun larangan, ‘*urf* dinamakan juga dengan adat.”

⁶³Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fi Ushulil Fiqh* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1999), hlm. 97

⁶⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), hlm. 89

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa '*urf*' itu adalah adat kebiasaan manusia yang telah lama ada, baik itu dari segi perkataan, perbuatan bahkan larangan. Maka dapat disimpulkan bahwa *Salah Simalah* termasuk kepada '*urf*' karena *Salah Simalah* ini juga merupakan perbuatan yang telah lama berjalan di kalangan masyarakat desa Teluk Pulau Luar.

Tradisi *Salah Simalah* yang telah ada sejak dahulu dalam masyarakat desa Teluk Pulau Luar sampai sekarang masih ditemui penerapannya, khususnya bagi mereka yang terikat dalam masa pertunangan yang cukup lama. Realisasinya adalah dalam bentuk perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dapat didengar dan disaksikan oleh banyak orang yang hadir, yang terlibat langsung dalam pembicaraan mengenai rencana pernikahan tersebut. meskipun tidak tercantum dalam sebuah perjanjian tertulis, namun mereka sangat mematuhi.

Jika dilihat dari definisi-definisi '*urf*' itu sendiri maka sebenarnya *Salah Simalah* ini juga dapat digolongkan kedalam '*urf*'. Sebab *Salah Simalah* ini juga mempunyai kriteria yang sama dengan yang dimaksudkan oleh Wahbah Zuhailiy dan Abdul Wahhab Khallaf.

D. Analisis Tradisi *Salah Simalah* Menurut Perspektif '*Urf*'

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang, hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas. Tetapi tradisi

menjadi hal yang sulit jika tidak serasi dengan pemahaman keagamaan secara umum.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka telah jelas bahwa tradisi ini masih dilestarikan oleh masyarakat desa Teluk Pulau Luar yang bertunangan. Bahkan tokoh adat masyarakat menganggap ini menjadi suatu yang harus dilaksanakan. Karena untuk mempersulit seseorang yang ingin membatalkan pinangannya, disamping itu juga menjaga tradisi ini untuk menjaga martabat seseorang. Maka mereka membuat denda yang didalamnya terdapat mahar yang diberikan sewaktu peminangan guna untuk tercapainya tujuan kedua pasangan tersebut.

Walaupun *Salah Simalahini* termasuk ke dalam '*urf*' maka perlu di tinjau lebih lanjut apakah ia tergolong kepada '*urf shohih*' atau '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' dan '*urf fasid*' menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam kitabnya *al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh*

هو ما تعارفه الناس دون ان يحل حراما أو يحرم حلالا.⁶⁵

Artinya: "*Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara*". Tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban."

'Urd Fasid

هو ما تعارفه الناس ولكنه يحل حراما أو يحرم حلالا.⁶⁶

Artinya: "*Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara*", menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban."

'Urf shohih dan '*urf fasid*' menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:

⁶⁵Wahbah az-Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1999), hlm. 99

⁶⁶Wahbah az-Zuhaily, hlm. 99

فا العرف الصحيح هو ما تعارفه الناس, ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا.⁶⁷

Artinya: “‘Urf shohih atau adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan yang wajib.”

Sedangkan ‘urf fasid adalah:

العرف الفاسد هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع او يحل المحرم او يبطل الواجب.⁶⁸

Artinya: “‘Urf fasid yaitu sesuatu adat atau kebiasaan yang sudah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara’ yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.”

Setelah defenisi-defenisi tentang ‘urf shohih dan ‘urf fasid maka penulis menggolongkan bahwa Salah Simalah kepada ‘urf fasid. Karena ‘urf fasid adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Dalam konteks Salah Simalah ini masyarakat desa Teluk Pulau Luar menjadikan mahar yang diberikan sewaktu peminangan sebagai denda. Padahal ketika didalam kajian fiqh jika tidak ada perkawinan maka tidak ada kewajiban atas mahar, oleh sebab itu mahar yang diberikan harus dikembalikan kepada yang mempunyai hak atas mahar tersebut. Maka hal ini menyalahi terhadap mahar itu sendiri sebagaimana didalam kitab fiqh yang telah lalu dibahas. Sebab jika tidak ada pernikahan maka tidak ada kewajiban atas mahar. Dalam kasus ini mahar yang diberikan lelaki pada saat peminangan hangus

⁶⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), hlm. 89

⁶⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 89

ketika lelaki tersebut membatalkan pernikahannya. Padahal boleh jadi lelaki membatalkan pernikahannya disebabkan tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak atau bahkan menemukan sifat-sifat buruk dari perempuan tersebut. Maka ini dapat merugikan salah satu pihak yang menyebabkan harus kehilangan sesuatu yang menjadi miliknya semula, untuk dijadikan sebagai ganti rugi, dan pada dasarnya semua orang memiliki hak yang sama untuk memilih antara melanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak melanjutkannya.

Hal ini sama saja memakan harta seseorang dengan cara yang *bathil*, padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surah an-Nisa ayat 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”

Dalam hal ini tidak ditemukan alasan yang benar untuk hangusnya mahar. Sebab mahar itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan karena adanya akad nikah atau senggama. Sementara dalam kasus ini belum terjadi nikah dan senggama yang menjadi sebab pembayaran mahar. Karena mahar menurut Nawawi al-Bantani adalah:

وهو ما وجب بعقد في المفوضة او وطء فيها.⁶⁹

Artinya: “*Mahar adalah sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad atau senggama*”

Selain itu menurut Wahbah az-Zuhaili mahar adalah:

هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها او بالدخول بها حقيقة.⁷⁰

⁶⁹Nawawi Al-Bantani, *Nihayatu Zain* (Beirut, Dar Al-Fikri, 2002), hlm. 287

Artinya: “*Mahar adalah harta yang menjadi hak istri atas suaminya disebabkan akad atasnya atau dukhul yang sebenarnya.*”

Uraian tentang pengertian mahar di atas jelas menyatakan bahwa mahar itu adalah pemberian dari seorang lelaki kepada seorang perempuan yang hendak dinikahinya, dan penyerahan maharnya adalah ketika akad. Pada tradisi *Salah Simalah* pemberian mahar di saat peminangan memang tidak menyalahi hukum Islam khususnya fiqh. Dalam hal ini dalam kitab Hasyiyah al-Jamal menjelaskan tentang pemberian harta saat peminangan:

فرع: سئل عن خطب امرأة ثم انفق عليها نفقة ليتزوجها فهل له الرجوع بما انفقه او لا؟ فأجاب: بأن له الرجوع بما أنفق على من دفعه له سواء أكان مأكلا ام مشربا ام ملبسا ام حلوى ام حليا وسواء رجع هو ام مجيبه ام مات احدهما لأنه أنما أنفق لأجل تزوجها فيرجع به ان بقي وببدله ان تلف وظاهر أنه لا حاجة الى التعرض لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها, لأنه صورة المسألة اذ لو قصد ذلك لم يختلف في عدم الرجوع

فرع: دفع الخاطب بنفسه او وكيله او وليه شيئا من مأكول او مشروب او نقد او ملبوس لمخطوبته او وليها ثم حصل اعراض من الجانبين او من احدهما او موت لهما او لأحدهما رجع الدافع او وارثه بجميع ما دفعه ان كان قبل العقد مطلقا وكذا بعده ان طلق قبل الدخول او مات الا ان ماتت هي ولا رجوع بعد

الدخول مطلقا.⁷¹

⁷⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Lebanon: Dar Al-fikri) hlm. 6758

⁷¹Zakarian Anshari, *Syarah Minhaj* (Beirut: Waru Ihya Turon, T.th), hlm. 129

Artinya: *“Cabang: ditanya masalah mengenai seorang lelaki yang meminang perempuan, memberikan suatu barang pada perempuan yang akan dinikahinya maka apakah boleh dikembalikan apa yang diberikannya atau tidak? Maka dijawab: bahwa sesungguhnya pemberian itu dikembalikan kepada yang memberinya baik berupa makanan, minuman, pakaian, makanan terbuat dari gula, maka dikembalikan pada lelaki tersebut. Atau mati salah satunya. Karena bahwasanya apa yang diberikan lelaki kepada perempuan supaya menikah dengannya, maka dikembalikan jika barang tersebut masih ada dan diganti jika hilang atau rusak. Dan pada umumnya bahwasanya lelaki memberikannya sebagai hadiah bukan untuk tujuan menikahinya sebagaimana gambaran masalah diatas. Maka tidak boleh diminta kembali.*

Cabang: peminang, atau waklinya atau walinya memberikan sesuatu dari makanan, minuman, atau yang berharga, atau pakaian yang dipinangnya atau kepada walinya. Kemudian terjadi penolakan dari kedua belah pihak atau salah satunya atau mati keduanya atau salah satunya pemberian itu dikembalikan seluruhnya kepada pemberinya. Jika terjadi sebelum akad secara mutlak, begitu juga setelah akad jika dia mentalak sebelum dukhul maka kembali mahar itu atau lelaki tersebut telah meninggal maka dikembalikan mahar tersebut. Kecuali jika perempuan tersebut telah meninggal dan tidak boleh dikembalikan setelah dukhul secara mutlak.”

Dalam kitab Fathul Mu'in menjelaskan

لو خطب امرأة ثم ارسل او دفع بلا لفظ اليها مالا قبل العقد اي ولم يقصد التبرع
ثم وقع الأعراض منها او منه, رجع بما وصلها منه, كما صرح به جمع

محققون.⁷²

Artinya: *“Apabila seorang lelaki meminag wanita kemudian mengirimkan atau menyerahkan sejumlah harta kepadanya sebelum akad terlaksana dengan tidak dibarengi suatu lafaz dan tidak dimaksudkan tabarru', kemudian terjadi pengunduran diri baik dari pihak lelaki maupun perempuan, maka lelaki berhak menarik kembali apa yang telah sampai ketangan perempuan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh segolongan ulama muhaqqiqun”*

Pemberian mahar sebelum akad tidak menjadi masalah sebagaimana ungkapan yang diatas pada kitab Syarah Minhaj dan Fathul Mu'in tersebut.

⁷²Ahmad Zainuddin al-Malibari, Fathul Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hizmin, 2004), hlm. 489-

Pada tradisi *salah Simalah* juga memberikan mahar saat peminangan atau sebelum akad. Tetapi yang menjadi masalah dalam tradisi ini saat pertunangan batal seluruh harta berupa hadiah ataupun mahar yang diberikan saat peminangan tidak kembali. Padahal jika tidak sampai kepada pernikahan maka mahar yang telah di dahulukan sebelum akad wajib dikembalikan, karena mahar hanya akan menjadi hak perempuan tersebut ketika setelah akad.

Memang, dalam beberapa kitab fiqh terdapat pembahasan tentang pengembalian mahar yang telah diberikan. Namun konteksnya ketika akad nikah telah terjadi, lalu terjadi perceraian sebelum persetubuhan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibnu Qosim bahwa mahar boleh dibatalkan separuh jika terjadi perceraian sebelum senggama:

ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها نصف المهر.⁷³

Artinya: “Dan gugur separuh mahar dengan thalak sebelum dukhul.”

Dalam kitab Hasyiyatan Qolyubi wa ‘Umairoh juga ditemukan satu ‘ibarah bahwa:

الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخه بعييها تسقط المهر وما لا كطلاق،
واسلامه وردته ولعانه وارضاع امه أو امها يشطره.⁷⁴

Artinya: “perceraian sebelum dukhul dari perempuan atau disebabkan perempuan seperti fasakh lelaki karena aib perempuan maka gugurlah seluruh mahar dan apa-apa yang tidak seperti thalak, dan islamnya lelaki, murtadnya lelaki, li’annya lelaki, sesusuan dengan ibunya lelaki atau lelaki sesusuan dengan ibunya perempuan maka jatuhlah mahar separuh.”

⁷³Ibnu Qosim, *Fathul Qorib* (Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2005), hlm. 236

⁷⁴Ahmad Salamah Qolyubi wa Ahmad ‘Umairoh, *Hasyiyatan Qolyubi wa ‘Umairoh* (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), hlm. 286

Penjelasannya adalah pembatalan mahar itu ada dalam fiqh dan dibolehkan pada situasi-situasi tertentu, hanya saja pembatalannya terjadi setelah akad. Contohnya seperti ketika cerai sebelum dukhul maka mahar kembali separuh, dan jika perceraian itu disebabkan oleh perempuan seperti suami memfasakh istrinya karena ada aib yang terdapat pada istrinya maka batal mahar seluruhnya. Ketentuan ini berlaku ketika belum terjadi dukhul, jika itu sudah terjadi maka tidak ada pembatalan mahar. Maka ungkapan diatas tidak bisa ditarik ke tradisi *Salah Simalah*.

Mengenai ini semua maka penulis menyatakan bahwa tradisi *Salah Simalah* ini tergolong kepada '*urf fasid*', sebab tradisi ini menjadikan mahar sebagai denda bagi siapa yang membatalkan pinangannya. penulis tegaskan sekali lagi bahwa mahar hanya menjadi hak perempuan ketika setelah akad, dan jika akad belum terjadi maka perempuan wajib mengembalikannya. Tidak terkecuali bagi mereka yang sama-sama ridho terhadap mahar yang dijadikan denda tersebut.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan semua uraian dan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

Tradisi *Salah Simalah* yang berlaku dari dahulu hingga sekarang di desa Teluk Pulau Luar adalah dalam bentuk perjanjian yang mengakibatkan hangusnya mahar yang diberikan laki-laki kepada calon isteri bila pembatalan rencana pernikahan muncul dari pihak laki-laki, sebaliknya bila pembatalan rencana pernikahan itu muncul dari pihak perempuan, maka pihak perempuan harus mengembalikan mahar yang telah diterimanya dengan jumlah dua kali lipat dari jumlah yang ia terima sebelumnya sesuai dengan perjanjian mereka sewaktu *mangantar balanjo*.

Dasar pemikiran munculnya *Salah Simalah* dalam pandangan masyarakat Teluk Pulau Luar adalah untuk melanggengkan hubungan pertunangan yang memiliki jarak waktu tertentu agar sampai ke jenjang pernikahan. Dengan adanya *Salah Simalah* tersebut maka kedua belah akan betul-betul menjaga diri dari upaya pembatalan rencana pernikahan yang dianggap akan merendahkan kehormatan dan marwah salah satu pihak.

Tradisi *Salah Simalah* yang berlaku di desa Teluk Pulau Luar dengan bentuk hangusnya mahar yang diberikan sebelum terjadinya akad nikah, atau pengembalian separuh dari nilai mahar yang telah diberikan sebelum terjadi akad nikah, atau pengembalian dua kali jumlah mahar yang diterima pihak

perempuan merupakan bentuk adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat islam. Bila ditinjau dari perspektif '*Urf*', maka adat kebiasaan *Salah Simalah* yang ada di desa Teluk Pulau Luar tergolong kepada '*Urf Fasid*' yang tidak dapat diterima sebagai landasan hukum karena menyalahi dari pengertian mahar itu sendiri.

B. Saran-saran

Kepada setiap orang yang memiliki keinginan untuk melaksanakan pernikahan hendaknya betul-betul mempersiapkan diri, baik mental maupun materil. Tradisi ini tidak perlu dihapus, hanya saja jangan menjadikan mahar sebagai denda bagi yang membatalkan pinangan. Boleh dibuat semacam peraturan desa bagi yang membatalkan pinangan maka dikenakan sanksi dengan senilai tiga ratus ribu rupiah. Selanjutnya denda tersebut bisa menjadi uang kas desa.

Kepada tokoh-tokoh agama hendaknya terus menerus memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat tentang keburukan-keburukan yang muncul akibat dari lamanya jarak pertunangan kepada pernikahan. Selain mendorong mereka untuk mengadakan *Salah Simalah* yang tidak sesuai syariat, juga membuka pintu maksiat yang sangat lebar kepada kedua pasangan yang masih dalam masa pertunangan.

Kepada setiap masyarakat hendaknya meninggalkan adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam dan bagi setiap orang tua hendaknya tidak membebankan biaya mahar dan pernikahan dengan nilai yang sulit untuk dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in* Beirut: Dar Ibn Hijmin, 2004.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990.
- Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Beirut: Dar al-Fikri, 1983.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadly dan Ahmad Khotib Surakarto: Intermedia, 2005.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, Jilid 4, terj. Abu Ihsan al-Atsari dan Amir Hamzah Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Adhi Fathi Abdullah, *Adab dan Tuntunan Meminang*, terj. Anshari Taslim Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.
- Amar Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Nawawi Al-Bantani, *Nihayatu Zain*, Beirut, Dar Al-Fikri, 2002.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Lebanon: Dar Al-fikri T.Th.
- M. Ali, Terj. *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Ibnu Qosim, *Fathul Qorib* (Beirut: Dar Ibn Hazmin, 2005.
- Ahmad Salamah Qolyubi wa Ahmad 'Umairoh, *Hasyiyatan Qolyubi wa 'Umairoh* Beirut: Dar al-Fikri, 1995.
- Su'di Abu Habibi, *al-Qamus al Fiqh Lughotan wa Istilahan*, Suriah: Darul Fikri, 1988.
- Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fi Ushulil Fiqh*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1999.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Beirut: Dar al-Fiqr, 1993.

Jalaluddin Assuyuthi, *Al-Asybah Wan Nazhoir*, Riyadh: Nazaru Mushtafa Al-Baz, 1997.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj Faiz el Muttaqin, hlm. 117. Hal senada diungkapkan oleh Wahbah Zuhailiy, *Al-Wazij fi Ushuli Fiqhi* (Suriah: Darul Fikri, 1999).

Bambang Sanggono, *metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
Marzuki, Tokoh Adat Masyarakat, Teluk Pulai Luar, Wawancara Pribadi, 07 September 2017.

M. Nazri Tanjung, Tokoh Adat Masyarakat, Wawancara Pribadi, Teluk Pulai Luar, 07 September 2017.

Ismail Tanjung, Tokoh Adat Masyarakat, Wawancara Pribadi, teluk Pulai Luar, 07 September 2017.

Nawawi Al-Bantani, *Nihayatu Zain*, Beirut, Dar Al-Fikri, 2002.

Abdurrohim, Tokoh Adat Masyarakat, Wawancara Pribadi, Teluk Pulai Luar, 07 September 2017.

Arifin, Pelaku Pembatalan Peminangan, Wawancara Pribadi, Teluk Pulai Luar, 08 September 2017.

Khoirun, Pelaku Pembatalan Peminangan, Wawancara Pribadi, Teluk Pulai Luar, 08 September 2017.

Paidul, Masyarakat Desa Teluk Pulai Luar, Wawancara Pribadi, 13 Nov 2017.

Ahmad Hudawi, Masyarakat Desa Teluk Pulai Luar, Wawancara Pribadi, 13 Nov 2017.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2014.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Nasrun Haroen, *Ushul FIqh 1*, Jakarta: Logos Wancana Ilmu, 1997.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ahmad Salamah Qolyubi wa Ahmad ‘Umairoh, *Hasyiyatan Qolyubi wa ‘Umairoh*, Beirut: Dar al-Fikri, 1995.